

PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

Setia Inggriani¹

setyainggriani0@gmail.com

¹Universitas Prabumulih

Meirani Betriana²

meiranibetriana555.ypp@gmail.com

²Universitas Prabumulih

Emi Sukmawati³

emisukmawati579@gmail.com

³Universitas Prabumulih

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap pendapatan daerah Kota Prabumulih. Belanja daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis regresi linear sederhana. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih periode 2020–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah Kota Prabumulih ($t_{hitung} = 3,632 > t_{tabel} = 3,182$; sig. $0,036 < 0,05$). Nilai R^2 sebesar 0,815 menunjukkan bahwa 81,5% variasi pendapatan daerah dapat dijelaskan oleh variabel belanja daerah. Hal ini mengimplikasikan bahwa pengelolaan belanja daerah yang efektif dan efisien, khususnya pada sektor produktif seperti infrastruktur dan pelayanan publik, merupakan faktor kunci dalam optimalisasi pendapatan daerah.

Kata Kunci: Belanja Daerah, Pendapatan Daerah, Realisasi APBD

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of regional expenditure on regional revenue in Prabumulih City. Regional expenditure is one of the fiscal policy instruments used by local governments to encourage economic growth and improve public welfare, which in turn is expected to increase regional revenue. The research method used is a quantitative method with a descriptive approach and simple linear regression analysis. The data used are secondary data in the form of regional budget realization reports (APBD) of Prabumulih City for the period 2020–2024. The results show that regional expenditure has a positive and significant effect on regional revenue in Prabumulih City ($t = 3.632 > 3.182$; sig. $0.036 < 0.05$). The R^2 value of 0.815 indicates that 81.5% of the variation in regional revenue can be explained by the regional expenditure variable. These findings imply that effective and efficient management of regional expenditure, particularly in productive sectors such as infrastructure and public services, is a key factor in optimizing regional revenue.

Keywords: Regional Expenditure, Regional Revenue, APBD Realization

PENDAHULUAN

Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola keuangan daerahnya secara mandiri. Salah satu instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah adalah belanja daerah, yakni seluruh pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran (PP No. 12 Tahun 2019). Belanja daerah yang dialokasikan secara tepat, terutama pada sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah.

Kota Prabumulih merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang dikenal sebagai pusat industri perminyakan dan memiliki potensi sektor pertanian serta perdagangan. Data laporan realisasi APBD Kota Prabumulih menunjukkan dinamika yang menarik, di mana pada tahun 2020 terjadi defisit karena realisasi belanja daerah (Rp1.024.031.018.357) melebihi pendapatan daerah (Rp972.243.373.625). Namun, pada periode 2021–2024 pemerintah daerah berhasil mempertahankan kondisi surplus seiring dengan pertumbuhan pendapatan yang konsisten.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan daerah. Zainuddin Rahman & Sumarni (2024) menemukan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan daerah di Kota Makassar. Widiyaanti (2020) juga menemukan pengaruh positif belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Riau. Namun, kajian empiris yang berfokus pada Kota Prabumulih masih terbatas, sehingga penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap pendapatan daerah Kota Prabumulih periode 2020–2024. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan alokasi belanja yang lebih efisien guna mengoptimalkan pendapatan daerah.

TINJAUAN LITERATUR

Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah (Dilliana & Herdi, 2022). Menurut PP No. 12 Tahun 2019, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer (Ambya, 2023).

Belanja operasi mencakup pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah, termasuk belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran. Alokasi belanja daerah yang tepat sasaran merupakan instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Anitasari, 2024).

Pendapatan Daerah

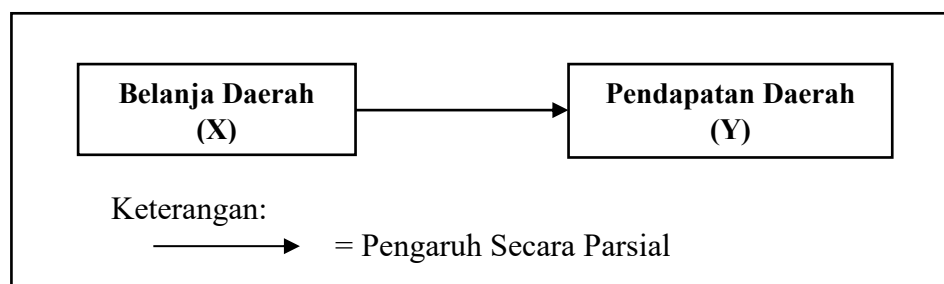
Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran (UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD mencerminkan tingkat

kemandirian fiskal daerah dan bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Hubungan Belanja Daerah dan Pendapatan Daerah

Secara teoritis, belanja pemerintah memiliki efek multiplier terhadap perekonomian daerah. Belanja yang diarahkan pada sektor produktif seperti infrastruktur dan pelayanan publik akan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan basis pajak dan retribusi daerah (Ramadhani et al., 2024). Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui belanja yang efektif dapat memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara berkelanjutan.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H_0 : Belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah Kota Prabumulih

H_1 : Belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah Kota Prabumulih.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian adalah Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, yang dilaksanakan pada tahun 2025–2026. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan realisasi APBD Kota Prabumulih periode 2020–2024 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Prabumulih melalui laman resmi kotaprabumulih.go.id. Variabel independen dalam penelitian ini adalah belanja daerah (X), yang diukur berdasarkan total realisasi belanja daerah per tahun dalam rupiah. Variabel dependen adalah pendapatan daerah (Y), yang diukur berdasarkan total realisasi pendapatan daerah per tahun dalam rupiah. Analisis data menggunakan regresi linear sederhana dengan persamaan: $Y = a + bX + e$. Sebelum analisis regresi, dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov) dan P-Plot serta uji heteroskedastisitas (grafik scatterplot). Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t (parsial) dan koefisien determinasi (R^2). Seluruh pengolahan data menggunakan software SPSS versi 27.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Tabel 1. menyajikan data realisasi belanja daerah dan pendapatan daerah Kota Prabumulih periode 2020–2024 yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.

Tabel 1. Realisasi Belanja Daerah dan Pendapatan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020–2024

Tahun	Belanja Daerah (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)
2020	1.024.031.018.357	972.243.373.625
2021	949.041.832.016	1.009.097.781.095
2022	994.230.665.915	1.004.882.518.351
2023	1.077.610.257.595	1.108.984.326.511
2024	1.192.748.634.643	1.197.851.689.057

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Prabumulih (2020–2024)

Berdasarkan Tabel 1, pada tahun 2020 terjadi defisit karena realisasi belanja daerah (Rp1.024.031.018.357) lebih besar dari pendapatan daerah (Rp972.243.373.625). Pada periode 2021–2024, kondisi berubah menjadi surplus karena pendapatan daerah secara konsisten melebihi realisasi belanja. Pertumbuhan pendapatan daerah dari Rp972 miliar (2020) menjadi Rp1.197 triliun (2024) menunjukkan peningkatan kapasitas fiskal yang signifikan.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 > 0,05, sehingga data residual dinyatakan berdistribusi normal. Hasil ini diperkuat oleh grafik Normal P-P Plot yang menunjukkan titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Uji heteroskedastisitas melalui grafik scatterplot menunjukkan titik-titik menyebar acak tanpa pola tertentu, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan terpenuhinya seluruh asumsi klasik, model regresi dinyatakan layak untuk digunakan.

Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Tabel 2 menyajikan hasil analisis regresi linear sederhana pengaruh belanja daerah terhadap pendapatan daerah Kota Prabumulih.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	87023044297,375	265266919808,585		,328	,764
	X1	,907	,250	,903	3,632	,036

a. Dependent Variable: Pendapatan Daerah

Sumber: Output SPSS Versi 27

Berdasarkan Tabel 2, persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$Y = 87.023.044.297,38 + 0,907X + e$$

Nilai konstanta sebesar 87.023.044.297,38 berarti apabila belanja daerah bernilai nol, pendapatan daerah diperkirakan sebesar Rp87.023.044.297,38. Koefisien regresi belanja daerah sebesar 0,907 berarti setiap kenaikan 1 Rupiah belanja daerah akan meningkatkan pendapatan daerah sebesar Rp0,907, dengan asumsi variabel lain konstan.

Hasil Uji Hipotesis

**Tabel 3. Hasil Uji t
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	87023044297,375	265266919808,585		,328	,764
	X1	,907	,250	,903	3,632	,036

a. Dependent Variable: Pendapatan Daerah

Sumber: Output SPSS Versi 27

Hasil pengujian pada tabel 3. di atas menunjukkan koefisien dari tingkat belanja adalah positif dengan t hitung sebesar 3,632 > t tabel 3,182 dan tingkat signifikan sebesar 0,036 < tingkat kesalahan (alpha) 0,05 maka akan disimpulkan bahwa **H₁ Diterima**, artinya belanja daerah (X) memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah (Y).

Hasil Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 4. Hasil Uji R²
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,903 ^a	,815	,753	46549408809,336

a. Predictors: (Constant), Belanja Daerah

b. Dependent Variable: Pendapatan Daerah

Sumber: Output SPSS versi 27

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh nilai R square sebesar 0,815 atau 81,5%. Hal ini berarti bahwa sebesar 81,5% variasi dalam pendapatan daerah dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini. sedangkan sisanya 18,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja modal. Nilai koefisien determinasi yang cukup tinggi ini menunjukkan bahwa model penelitian ini memiliki kemampuan penjelas yang baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belanja daerah memiliki distribusi yang cukup besar dalam menjelaskan tingkat pendapatan daerah.

Pembahasan

Hasil uji t menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah Kota Prabumulih (thitung = 3,632 > ttabel = 3,182; sig. 0,036 < 0,05), sehingga H₁ diterima. Temuan ini konsisten dengan teori efek multiplier pengeluaran

pemerintah, di mana belanja yang dialokasikan pada sektor produktif mendorong aktivitas ekonomi masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan daerah.

Secara empiris, peningkatan belanja daerah dari Rp949 miliar (2021) menjadi Rp1.192 triliun (2024) sejalan dengan peningkatan pendapatan daerah dari Rp1.009 triliun menjadi Rp1.197 triliun pada periode yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja pemerintah daerah Kota Prabumulih telah diarahkan pada kegiatan-kegiatan produktif yang mampu merangsang pertumbuhan ekonomi lokal dan memperluas basis pendapatan daerah.

Nilai R^2 sebesar 0,815 menunjukkan bahwa 81,5% variasi pendapatan daerah dapat dijelaskan oleh variabel belanja daerah, sedangkan 18,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi regional, harga komoditas unggulan daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK), tingkat investasi swasta, serta efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Temuan ini sejalan dengan Zainuddin Rahman & Sumarni (2024) yang menemukan pengaruh positif belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar, serta Widiyaanti (2020) yang mendapatkan hasil serupa pada Provinsi Riau. Ramadhani et al. (2024) juga mengkonfirmasi bahwa belanja daerah dan PDRB secara positif memengaruhi peningkatan PAD di Kalimantan Barat

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah Kota Prabumulih periode 2020–2024 ($t_{hitung} = 3,632 > t_{tabel} = 3,182$; $sig. 0,036 < 0,05$). Belanja daerah mampu menjelaskan 81,5% variasi pendapatan daerah ($R^2 = 0,815$). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah yang efektif dan efisien, terutama yang diarahkan pada sektor produktif, merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kapasitas fiskal Kota Prabumulih.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah Kota Prabumulih disarankan untuk mengoptimalkan alokasi belanja daerah pada sektor-sektor yang memberikan dampak multiplier tinggi terhadap perekonomian daerah, seperti infrastruktur, pengembangan usaha mikro kecil menengah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengelolaan belanja yang transparan dan akuntabel juga perlu diperkuat untuk meningkatkan kepercayaan publik dan menarik investasi. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas variabel penelitian dengan menambahkan faktor eksternal seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), tingkat investasi swasta, atau PDRB, serta memperpanjang periode pengamatan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- Ambya. (2023). Buku Ajar Ekonomi Keuangan Daerah. AURA CV Anugrah Utama Raharja.
- Andi, M., & Tajuddin Imran. (2024). Pengaruh Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*. E-ISSN: 2599-3410.
- Anitasari, M. (2024). *Ekonomi Keuangan Daerah*. Wawasan Ilmu.
- Aji Bayu, G. (2023). Pengaruh Belanja Daerah, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2017–2021. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. ISSN: 1693-1688.
- Dilliana, S. M., & Herdi, H. (2022). *Manajemen Keuangan Daerah*. Eureka Media Aksara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Ramadhani, D. R., et al. (2024). Pengaruh Belanja Daerah dan PDRB Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(2).
- Rahman, Z., & Sumarni. (2024). Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*. E-ISSN: 2599-3410.
- Sahir, H. (2021). *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia.
- Sugiyono. (2024). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Widiyaanti, N. (2020). Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. ISSN: 1453-1465.
- Zahrina, S., & Azlina, A. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Aceh. *Jurnal Ekobismen*, 5(2), 223–234.